



# PROSIDING

SEMINAR NASIONAL & SIDANG PLENO ISEI XVII

PEMBAHARUAN INSTITUSI EKONOMI  
DAN MUTU MODAL MANUSIA



Ternate, 3 – 5 September 2014



# **PROSIDING**

## **SEMINAR NASIONAL & SIDANG PLENO ISEI XVII**

**PEMBAHARUAN INSTITUSI EKONOMI  
DAN MUTU MODAL MANUSIA**

**Ternate, 3 – 5 September 2014**

# **PROSIDING**

## **SEMINAR NASIONAL & SIDANG PLENO ISEI XVII**

### **PEMBAHARUAN INSTITUSI EKONOMI DAN MUTU MODAL MANUSIA**

**Ternate, 3 – 5 September 2014**

**Editors:**

Sri Adiningsih  
Mangara Tambunan  
Ahmad Erani Yustika  
Pos M. Hutabarat  
Anton H. Gunawan  
Denni P. Purbasari

Hermanto Siregar  
Bustanul Arifin  
Aviliani  
Edy Suandi Hamid  
Lincoln Arsyad  
Nimmi Zulbainarni

Ina Primiana  
Yohannes Kadarusman  
Rimawan Pradiptyo  
Firman S. Parningotan

**Penyusun:**

Y. Sri Susilo  
Rokhedi P. Santoso  
Firman S. Parningotan  
Efrilia Sukmagraha  
Rian N. Sandi

**Dipublikasi oleh:**  
**Pengurus Pusat – Ikatan Sarjana Ekonomi Indonesia**

Ikatan Sarjana Ekonomi Indonesia, Sidang Pleno (ke-17 : 2014 : Ternate)

Prosiding Seminar Nasional dan Sidang Pleno XVII

Pembaharuan Institusi Ekonomi  
dan Mutu Modal Manusia

Editor, Hermanto Siregar...[et al.].

Jakarta : Pengurus Pusat Ikatan Sarjana Ekonomi Indonesia (2014)

xxxvi & 276 hlm; 21 X 29,7cm

ISBN 978-602-14722-1-7

Cetakan kedua, Desember 2014

Penerbit : Pengurus Pusat Ikatan Sarjana Ekonomi Indonesia

Jl. Daksa IV / 9, Kebayoran Baru Jakarta Selatan 12110

Telp. : +62 21 720 8130 / 722 2463, Fax. : +62 21 720 1812

Email : [isei.pusat@gmail.com](mailto:isei.pusat@gmail.com)

Hak Cipta PP - ISEI, 2013

## KATA PENGANTAR

Pemilihan anggota legislatif dan presiden serta wakil presiden yang akan menentukan Indonesia dalam lima tahun ke depan sudah terlaksana dengan lancar dan aman. Pemimpin baru Indonesia sudah terpilih. Sudah saatnya seluruh rakyat Indonesia termasuk anggota ISEI merapatkan kembali barisan untuk bersiap-siap ikut berpartisipasi secara aktif dalam pembangunan ekonomi Indonesia untuk lima tahun ke depan. Apalagi tantangan baik dari dalam negeri, regional maupun global sudah menghadang di depan mata. Masyarakat Ekonomi ASEAN, kompleksitas perjanjian perdagangan baik bilateral maupun multilateral, dan berbagai isu domestik lainnya seperti bonus demografi, *Middle Income Trap* sudah menanti untuk segera mendapatkan respon dan tindakan dari pemerintah baru nanti.

Pemilihan tema “Pembaharuan Institusi Ekonomi dan Mutu Modal Manusia” pada Seminar Nasional dan Sidang Pleno ISEI ke XVII di Ternate ini dipilih bukan tanpa alasan. Hasil *Call for Paper* dan *Small Research* yang diselenggarakan oleh PP ISEI yang melibatkan para mahasiswa, dosen, praktisi dan anggota ISEI daerah menegaskan urgensi untuk meningkatkan kualitas institusi ekonomi terutama lembaga, birokrasi dan kebijakan pemerintah yang akan menentukan *rule of the game* bagi bekerjanya sistem ekonomi secara efisien dan efektif di Indonesia. Selain itu pembangunan modal manusia baik dari sisi kuantitas ataupun kualitas melalui pendidikan dan kesehatan adalah sentral dalam perekonomian. Pembangunan institusi ekonomi dan manusia di Indonesia saat ini membutuhkan sebuah akselerasi bukan sekedar *business as usual* karena Indonesia sudah tertinggal di ASEAN dan *emerging countries* lainnya. Tanpa adanya akselerasi, jangan mengharapkan kondisi ekonomi Indonesia akan lebih baik dalam lima tahun atau bahkan satu dekade mendatang, karena institusi ekonomi dan mutu modal manusia penting dalam pembangunan ekonomi Indonesia.

Tema-tema penting yang diambil dalam Sidang Pleno kali ini sangat relevan bagi pembangunan Indonesia kedepan. Dari enam sub tema yang telah dipilih oleh PP ISEI untuk dianalisis dan didiskusikan lebih lanjut dalam serangkaian kegiatan yang diagendakan dalam Seminar Nasional dan Sidang Pleno selama 3 hari ini diharapkan dapat memunculkan sebuah rekomendasi konkret dan implementatif yang dapat berkontribusi positif terhadap akselerasi pembaharuan institusi ekonomi dan perbaikan mutu modal manusia Indonesia. Dengan demikian PP ISEI diharapkan bisa memberikan kontribusi yang positif dan senantiasa optimis bagi terwujudnya Indonesia yang lebih baik tanpa mengesampingkan pemikiran yang kritis dan konstruktif.

Ketua Tim Editor

**Prof. Dr. Sri Adiningsih**

# DAFTAR ISI

<b>Kata Pengantar</b> .....	v
<b>Daftar Isi</b> .....	vi - vii
<b>SAMBUTAN KETUA ISEI TERNATE</b>	
Dr. H. Burhan Abdurrahman, MM .....	viii
<b>SAMBUTAN KETUA PANITIA PELAKSANA PUSAT</b>	
Prof. Dr. Edy Suandi Hamid .....	ix - x
<b>SAMBUTAN KETUA UMUM PP-ISEI</b>	
Dr. Darmin Nasution.....	xi - xiii
<b>PIDATO PENUTUPAN KETUA HARIAN PP-ISEI</b>	
Dr. Muliaman D. Hadad.....	xiv - xv
<b>SAMBUTAN SULTAN TERNATE</b>	
Drs. H. Mudaffar Sjah, MSi .....	xvi - xvii
<b>SAMBUTAN GUBERNUR MALUKU UTARA</b>	
Abdul Gani Kasuba.....	xviii - xix
<b>KEYNOTE SPEECH GUBERNUR BANK INDONESIA</b>	
Agus D. W. Martowardoyo .....	xx - xxxi
<b>KEYNOTE SPEECH WAKIL MENTERI KEUANGAN</b>	
Prof. Dr. Bambang Brodjonegoro .....	xxxii - xxxv
<b>KONEKTIVITAS INFRASTRUKTUR DI INDONESIA DARI CETAK BIRU HINGGA IMPLEMENTASI</b>	
Dr. Agus Edy Susilo .....	1 - 17
<b>INSTITUSI, BIAYA TRANSAKSI, DAN KINERJA EKONOMI: SEBUAH TINJAUAN TEORITIS</b>	
Prof. Lincoln Arsyad, Ph.D. ....	18 - 29
<b>KESIAPAN JASA PERGURUAN TINGGI INDONESIA MENGHADAPI ASEAN ECONOMIC COMMUNITY</b>	
Prof. Dr. Edy Suandi Hamid.....	30 - 44
<b>ROAD MAP MENUJU INDONESIA SEBAGAI NEGARA MARITIM YANG MAJU, MAKMUR, KUAT, DAN BERDAULAT</b>	
Prof. Dr. Rokhmin Dahuri .....	45 - 52
<b>POTENSI DAN PENGEMBANGAN SUB-SEKTOR KELAUTAN DAN PERIKANAN INDONESIA</b>	
Yugi Prayanto.....	53 - 61
<b>PEMBANGUNAN EKONOMI NASIONAL: MANUSIA SEBAGAI MODAL UTAMA PEMBANGUNAN</b>	
Prof. Dr. Suahasil Nazara .....	62 - 68
<b>PEMBANGUNAN GENERASI MUDA: MASA DEPAN KBE DAN EKONOMI KREATIF</b>	
Prof. Dr. Bustanul Arifin .....	69 - 73
<b>LIBERALIZATION AND TRADE SPECIALIZATION: CASE STUDY OF INDONESIA'S MANUFACTURING INDUSTRY 1990-2010</b>	
Endah Ayu Ningsih .....	74 - 86
<b>KESIAPAN PELAKU EKONOMI DAN DAYA SAING INDONESIA MENGHADAPI MASYARAKAT EKONOMI ASEAN 2015</b>	
Tanti Novianti & Dian V. Panjaitan .....	87 - 97
<b>ANALISIS KEUNGGULAN KOMPARATIF INDONESIA DALAM PERDAGANGAN INTERNASIONAL ASEAN</b>	
Grisvia Agustin .....	98 - 107
<b>PENGEMBANGAN SEKTOR BERBASIS KEPULAUAN DAN PARIWISATA BERBASIS LINGKUNGAN DI PROVINSI MALUKU UTARA</b>	
Chairullah Amin & Rahman D. Mustafa .....	108 - 128

<b>TUNA FOR LIFE: SEBUAH KAJIAN STRATEGIS EKONOMI KELAUTAN MALUKU UTARA</b> Muhadjir K. Marasaoly .....	129 - 137
<b>MIDDLE INCOME TRAP DI INDONESIA: FAKTOR PENENTU DAN STRATEGI MENGHINDARINYA</b> Erica Novianti Lukas & Yohanes Berenika Kadarusman.....	138 - 148
<b>TOTAL FACTOR PRODUCTIVITY (TFP) SEBAGAI KEKUATAN PERTUMBUHAN EKONOMI</b> Dwi Rahmayani & FX. Sugiyanto .....	149 - 159
<b>ANALISIS EKSISTENSI PERANGKAP PENDIDIKAN DI INDONESIA</b> Een Novritha Walewangko & David P.E. Saerang .....	160 - 176
<b>STRATEGI PENGEMBANGAN LEMBAGA KEUANGAN NON BANK PADA MASYARAKAT DENGAN KULTUR BUDAYA YANG KUAT. STUDI KASUS: BALI, INDONESIA</b> Agni Alam Awirya & Uswatun Hasanah .....	177 - 189
<b>INDIKATOR DAN KARAKTERISTIK PEMBANGUNAN DESA SEBAGAI BASIS IMPLEMENTASI ATAS UNDANG-UNDANG DESA</b> Mulyanto.....	190 - 204
<b>PRODUKTIFKAH HUMAN CAPITAL INVESTMENT OLEH PEMERINTAH DAERAH?: FAKTA DESENTRALISASI FISKAL DI INDONESIA</b> Bambang Suprayitno, Tejo Nurseto & Supriyanto .....	205 - 218
<b>MANAJEMEN SUMBER DAYA LAUT DENGAN MENERAPKAN KAWASAN KONSERVASI LAUT (KKL) DAN MENGADOPSI TRADISI ADAT “SASI” DI INDONESIA TIMUR</b> Umi Muawanah, Farhed A. Shah & Robert S. Pomeroy .....	219 - 229
<b>ANALISIS BIOEKONOMI MULTISPESIES UNTUK KEBERLANJUTAN PERIKANAN TUNA DI INDONESIA (KASUS PELABUHAN RATU, IOTC AREA)</b> Nimmi Zulbainarni.....	230 - 245
<b>GINI COEFFICIENTS OF EDUCATION IN INDONESIA: FINDING FROM 2010 POPULATION CENSUS</b> Devanto S. Pratomo.....	246 - 254
<b>PENGARUH BELANJA PEMERINTAH DAERAH UNTUK KESEJAHTERAAN RAKYAT TERHADAP PENURUNAN KEMISKINAN DI INDONESIA: ANALISIS EKONOMETRIKA PANEL DATA TINGKAT PROVINSI</b> Heni Hasanah & Hermanto Siregar .....	255 - 264
<b>INTERAKSI STRATEGIS BELANJA PEMERINTAH DAERAH DAN YARDSTICK COMPETITION DI PROVINSI JAWA TENGAH</b> Sandy Juli Maulana & Akhmad Syakir Kurnia .....	265 - 273
<b>PERUMUSAN HASIL DAN REKOMENDASI .....</b>	274 - 276

# INDIKATOR DAN KARAKTERISTIK PEMBANGUNAN DESA SEBAGAI BASIS IMPLEMENTASI ATAS UNDANG-UNDANG DESA<sup>1)</sup>

**Mulyanto**

Fakultas Ekonomi dan Bisnis – Universitas Sebelas Maret(UNS) Surakarta

Pusat Informasi dan Pembangunan Wilayah (PIPW) – LPPM UNS

E-mail: [yanto.mul@gmail.com](mailto:yanto.mul@gmail.com)

## Abstrak

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menyusun Indeks Pembangunan Desa (*IPDesa*) yang dibentuk dari seperangkat indikator pembangunan Desa. Di samping itu juga untuk meneliti kinerja *IPDesa* jika dilihat dari beberapa variabel pembedanya. Sistem indeks yang dilengkapi alat uji korelasi dan analisis varian satu jalur, digunakan untuk menganalisis *IPDesa* yang berbasis pada data sekunder tahun 2011 di 391 desa di Kabupaten Klaten Provinsi Jawa Tengah. Dari hasil studi ditemukan bahwa dari 9 indikator penentu *IPDesa*, satu-satunya indikator yang secara absolut maupun dari besaran derajat korelasi yang hampir sama adalah Indikator Kesejahteraan Masyarakat (*IJAHMAS*). Hal ini mengindikasikan bahwa *IJAHMAS* mempunyai peran penting dalam pembentukan *IPDesa*. Dari 5 (lima) faktor pembeda, hanya ada 2 variabel pembeda yang signifikan, yaitu variabel rasio lahan pertanian dan variabel migrasi bersih (*net migrations*).

## Abstract

The purpose of this study is to develop the Development Index of Villages (*VDI*) that it is formed from a set of development indicators for villages. In addition it is also to examine the performance of *VDI* when viewed from several differences of control variables. The index system that complemented with test of correlation and analysis of variance were used to analyze differences of *VDI* based on secondary data in 2011. The document of Sub District in the Figures published by BPS in Klaten district in Central Java Province is used to support this study. From the results of the study, it was found that of 9 *VDI* determinants, the only indicator that in absolute terms and the degree of correlation almost similar was Indicators of Public Welfare (*IJAHMAS*). This indicates that *IJAHMAS* have an important role in the formation of *VDI*. Of 5 (five) differentiating factors, there were only 2 variables significant different, i.e the ratio of agricultural land and variable of net migration.

### Kata Kunci:

Pembangunan Desa, Indikator Pembangunan Desa, Sistem Indeks, Klasifikasi Desa, Klaten\_Jawa Tengah

**JEL Classification:** r12, r58

<sup>1)</sup>Paper disampaikan dalam Kegiatan Sidang Pleno ISEI XVII dengan tema: “**PEMBAHARUAN INSTITUSI EKONOMI DAN MUTU MODAL MANUSIA**”, yang akan dilaksanakan di Ternate, 3-5 September 2014. Paper ini bagian dari riset yang didanai oleh Universitas Sebelas Maret (UNS) Surakarta dari Dana Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Tahun Anggaran 2014. Paper ini dapat dikategorikan ke dalam sub tema: **Pembaharuan Institusi Ekonomi dalam Mendukung Perekonomian**.

## I. PENDAHULUAN

Pembangunan desa mendapatkan perhatian secara mendalam oleh Pemerintah, khususnya setelah ditetapkan Undang-Undang (UU) Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, yang kemudian ditidakanjuti dengan penetapan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Kedua peraturan ini menjadi dasar pentingnya pembangunan Indonesia yang dimulai dari tingkat pemerintahan yang paling rendah.

Dalam PP Nomor 43 Tahun 2014, khususnya Pasal 91 telah pula dinyatakan bahwa: “*Seluruh pendapatan Desa diterima dan disalurkan melalui rekening kas Desa dan penggunaannya ditetapkan dalam APBDesa*”. Hal ini membawa implikasi bahwa penggunaan dana Desa harus optimal dan juga harus jelas peruntukannya, agar tidak terjadi permasalahan hukum di kemudian hari yang melibatkan banyak pihak di Pemerintahan Desa.

Dengan jumlah Desa di seluruh Indonesia yang hingga saat ini telah mencapai sekitar 73.000 desa (Penjelasan UU Nomor 6 Tahun 2014), dan setiap desa diperkirakan akan menerima dana desa antara Rp.800 juta hingga Rp.1,4 milyar; maka upaya untuk mencari alternatif penggunaan dana/alokasi dana desa perlu segera dilakukan dan diformulasikan.

Studi ini merupakan salah satu upaya untuk menjawab permasalahan di atas dengan cara membentuk suatu model pengukuran kemajuan pembangunan desa dan mencari beberapa faktor yang dapat membedakan tingkat kemajuan pembangunan antar desa. Model yang terbentuk, selain bermanfaat untuk mengukur tingkat kemajuan pembangunan desa, juga bermanfaat sebagai pertimbangan dalam menentukan Alokasi Dana Desa (ADD) yang terkait dengan seperangkat indikator penentu kemajuan pembangunan desa.

Berbagai studi dalam konteks pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota di seluruh Indonesia telah banyak juga diterapkan. Bappenas, BPS dan UNDP (2001, 2004) misalnya; telah mengembangkan pengukuran Indeks Pembangunan Manusia (IPM). Penerapan model IPM untuk konteks pembangunan desa pernah juga diimplementasikan oleh Mulyanto dan Magsi (2014), dengan mengambil populasi desa di 4 (empat) kabupaten di Provinsi Jawa Tengah, yaitu: (i) Kabupaten Wonogiri, (ii) Kabupaten Klaten, (iii) Kabupaten Sragen, dan (iv) Kabupaten Sukoharjo Provinsi Jawa Tengah.

Sementara untuk konteks pemerintah di 31 provinsi di Republik Rakyat China (RRC), Wang (2007) juga telah melakukan studi untuk mengukur kemajuan pembangunan yang diberi judul *Regional Development Index (RDI)*. Wang (2007) mengembangkan *RDI* dengan mempertimbangan 10 (sepuluh) indikator dasar (Pembangunan Ekonomi, Produktivitas dan *Research and Development (R and D)*, Pembangunan Manusia, Pendidikan, Keadilan Sosial, Pelayanan Publik, Jaminan Sosial, Sarana dan Prasarana, Perlindungan Lingkungan, serta Pengembangan Kelembagaan), dan 1 (satu) indeks acuan, yaitu Indikator Sumber Daya Alam (SDA) dan Lokasi Geografi.

Model untuk konteks provinsi di Indonesia pernah juga diterapkan oleh Bappenas (2001), dengan judul kajian: “Indeks Pembangunan Daerah (IPD) atau *Regional Development Index (RDI)*” untuk pemerintahan di 26 provinsi di Indonesia dengan menggunakan data sekunder tahun 1994, 1996 dan 1998. Dalam menyusun IPD/RDI, Bappenas (2001) menggunakan 3 (tiga) indikator utama, yaitu: (i) Kapabilitas Pemerintah, (ii) Perkembangan Wilayah, dan (iii) Keberdayaan Masyarakat. Masing-masing indikator tersebut, kemudian diturunkan ke dalam sub-sub indikator pembentuknya.

Model-model pembangunan untuk beberapa kasus di luar Indonesia, yang juga pernah dikembangkan, antara lain: (i) *Indicators of Good Governance / IGG (Philippine Institute for Development Studies, 1999)*; (ii) *Regional Attractiveness Index / RAI (Price-Waterhouse Cooper, 2001)*; (iii) *Urban Governance Index / UGI (UN-HABITAT, 2002)* dalam rangka *Global Campaign on Urban Governance*; (iv) *Environmental Sustainability Index / ESI (Yale University, 2005)*; (v) *Indicators of Sustainability Development / ISD (United Nations, 2007)*; dan (vi) *Vulnerability and Resilience Index / VRI (Malta University, 2008)*.

Dari latar belakang di atas, tujuan dari studi yang diringkas dalam tulisan ini, yaitu: (i) menyusun model pengukuran kemajuan pembangunan desa, dan (ii) meneliti karakteristik kemajuan pembangunan desa, jika dilihat dari berbagai sudut pandang, yaitu: (a) jenis/tipologi desa, (b) pembagian zona kota-desa, (c) kondisi perpindahan penduduk desa (*net migrations*), (d) jangkauan pelayanan (jarak kabupaten dengan desa), dan (e) rasio jenis kelamin (*sex ratio*).

## II. METODE PENELITIAN

### A. Obyek Penelitian

Studi ini hanya menggunakan 1 (satu) titik waktu yaitu kondisi desa pada tahun 2011 yang mencakup banyak sampel (*cross-section analysis*). Unit analisis dalam studi ini adalah entitas/organisasi yaitu instansi pemerintahan desa; dengan mengadakan pengukuran terhadap hal-hal yang terkait dengan obyek pemerintahan desa atau propertinya. Properti dari Pemerintahan Desa (Pemdes), misalnya: jumlah aparatur Pemdes, jumlah penduduk, luas wilayah, jumlah rumah tangga, jumlah sarana kesehatan desa, jumlah tenaga medis, dan seterusnya. Sebanyak 391 desa (seluruh desa) yang tersebar di 26 kecamatan di Kabupaten Klaten dijadikan sebagai obyek dalam studi ini (Gambaran peta Kabupaten Klaten, dapat dilihat pada **Lampiran 1**). Data diambil dari buku Kecamatan Dalam Angka Tahun 2011 yang diterbitkan oleh Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Klaten, yang mencakup sejumlah 26 kecamatan.

### B. Penyusunan Indikator Penentu Kemanjauan Pembangunan Desa

Dalam menyusun tolok ukur / indikator kemajuan pembangunan Desa, digunakan 9 (sembilan) indikator, yaitu: (i) Kapasitas Aparatur dan Jangkauan Pelayanan Publik, (ii) Kekayaan dan Keuangan Desa, (iii) Sarana Perekonomian Desa, (iv) Sarana Transportasi dan Telekomunikasi, (v) Kelembagaan dan Partisipasi Masyarakat Desa, (vi) Kesejahteraan Masyarakat, (vii) Pendidikan Masyarakat, (viii) Kesehatan Masyarakat, dan (ix) Kesejahteraan Keluarga. Secara operasional, ke-9 indikator tersebut dapat dijabarkan sebagai berikut (Mulyanto, 2013):

#### 1. Kapasitas Aparatur dan Jangkauan Pelayanan Publik

- a. Rasio jumlah aparatur pemerintah desa terhadap jumlah penduduk dikali 1.000
- b. Rasio jumlah aparatur pemerintah desa terhadap jumlah rumah tangga dikali 1.000
- c. Rasio jumlah aparatur pemerintah desa terhadap luas wilayah
- d. Proporsi aparatur pemerintah desa yang lulus SMA ke atas terhadap keseluruhan jumlah aparatur dikali 100

#### 2. Kekayaan dan Keuangan Desa

- a. Rasio Alokasi Dana Desa (ADD) terhadap jumlah rumah tangga
- b. Rasio Pajak Bumi dan Bangunan terhadap jumlah rumah tangga
- c. Rasio Pendapatan Desa dalam APBD terhadap jumlah rumah tangga
- d. Rasio Pendapatan Asli Desa dalam APBD terhadap jumlah rumah tangga
- e. Rasio Tanah Kas Desa terhadap jumlah rumah tangga dikali 1000

#### 3. Sarana Perekonomian Desa

- a. Rasio jumlah fasilitas perdagangan dan lembaga keuangan terhadap jumlah penduduk dikali 1.000
- b. Rasio jumlah industri (Mikro, Kecil dan Menengah) terhadap jumlah penduduk dikali 1.000
- c. Persentase jumlah perkerja di sektor pertanian terhadap total perkerja
- d. Persentase jumlah perkerja di sektor Industri terhadap total perkerja

#### **4. Sarana Transportasi dan Telekomunikasi**

- a. Jumlah alat transportasi bermesin terhadap jumlah rumah tangga dikali 100
- b. Rasio panjang jalan beraspal terhadap keseluruhan panjang jalan dikali 100 di suatu desa.
- c. Rasio keseluruhan panjang jalan terhadap luas wilayah di suatu desa
- d. Rasio jumlah sarana telekomunikasi terhadap jumlah rumah tangga dikali 100

#### **5. Kelembagaan dan Partisipasi Masyarakat Desa**

- a. Jumlah kelembagaan Rukun Warga (RW) terhadap penduduk dikali 1.000
- b. Jumlah kelembagaan Rukun Tetangga (RT) terhadap penduduk dikali 1.000
- c. Rasio jumlah sarana ibadah terhadap penduduk dikali 1.000
- d. Jumlah organisasi kelompok tani yang ada di suatu desa
- a. Jumlah organisasi kelompok Dasa Wisma yang ada di suatu desa

#### **6. Kesejahteraan Masyarakat**

- a. Rasio produksi padi terhadap jumlah penduduk
- b. Rasio penduduk miskin terhadap jumlah rumah tangga (kepala keluarga) dikali 100%
- c. Jumlah penyandang cacat
- d. Jumlah peristiwa perceraian yang terjadi selama satu tahun
- e. Rasio jumlah ternak terhadap rumah tangga
- f. Rasio jumlah unggas terhadap rumah tangga

#### **7. Pendidikan Masyarakat**

- a. Rasio jumlah gedung Sekolah Dasar (SD) terhadap jumlah murid SD dikali 100
- b. Rasio jumlah murid terhadap guru jenjang pendidikan SD
- c. Rasio siswa SD terhadap jumlah penduduk usia 7-12 tahun dikali 100
- d. Persentase penduduk lulusan SLTA dan AK/PT terhadap penduduk usia 5 tahun ke atas.

#### **8. Kesehatan Masyarakat**

- a. Rasio jumlah sarana kesehatan terhadap penduduk dikali 1.000
- b. Rasio jumlah tenaga medis terhadap jumlah penduduk dikali 1.000
- c. Jumlah posyandu.
- d. Rasio jamban keluarga terhadap jumlah rumah tangga kali 100%
- e. Tingkat kematian bayi per 1.000 jumlah penduduk pertengahan tahun.
- f. Tingkat kelahiran bayi per 1.000 jumlah penduduk pertengahan tahun.

#### **9. Kesejahteraan Keluarga**

- a. Jumlah penduduk dibagi jumlah rumah tangga
- b. Jumlah penduduk usia belum produktif dan usia tidak produktif dibagi penduduk usia produktif dikali 100
- c. Rasio rumah permanen terhadap keseluruhan rumah dikali 100%.
- d. Rasio peserta Keluarga Berencana (KB) aktif terhadap Pasangan Usia Subur (PUS) dikali 100%
- e. Rasio rumah tangga pelanggan listrik terhadap jumlah rumah tangga keseluruhan dikali 100%

Sebelum diagregasi dalam suatu indikator (keseluruhan ada 9 indikator) sebagai penentu kemajuan pembangunan desa, variabel tertentu yang membentuk suatu indikator akan ditransformasikan terlebih dahulu ke satu nilai atau besaran dengan sistem indeks. Penilaian dalam sistem indeks mempunyai standar nilai 0 (tingkat pembangunan paling rendah atau paling buruk) sampai dengan standar nilai 10 (tingkat pembangunan paling tinggi atau paling baik). Pendekatan ini pernah digunakan oleh

Wang (2007) dalam menghitung Indeks Pembangunan Daerah (*Regional Development Index*) di 31 provinsi di Republik Rakyat China (RRC).

Untuk indikator yang positif, yaitu nilai yang lebih tinggi mencerminkan tingkat pembangunan yang lebih baik, besaran nilai dihitung dengan rumus (Agarwal dan Samanta, 2006 dan Wang, 2007):

$$i^{\text{th}} \text{ desa} = \frac{V_i - V_{\min}}{V_{\max} - V_{\min}} \times 10 \quad \dots \dots \dots (2.1)$$

Sementara untuk indikator yang negatif, yaitu nilai yang lebih rendah mencerminkan tingkat pembangunan yang lebih baik, besaran nilai dihitung dengan rumus (Agarwal dan Samanta, 2006 dan Wang, 2007):

$$i^{\text{th}} \text{ desa} = \frac{V_{\max} - V_i}{V_{\max} - V_{\min}} \times 10 \quad \dots \dots \dots (2.2)$$

Dimana:  $i^{\text{th}}$ , merupakan hasil transformasi suatu variabel tertentu ke dalam bentuk sistem indeks dengan standar 0–10 satuan indeks;  $V$ , merupakan nilai variabel yang akan membentuk suatu indikator, dengan simbol  $V_{\max}$ , berarti nilai yang maksimal atau yang paling tinggi dari keseluruhan sampel dan  $V_{\min}$ , berarti nilai yang minimal atau paling kecil dari keseluruhan sampel dalam studi;  $V_i$ , merupakan nilai variabel yang dimiliki suatu desa yang akan dihitung sistem indeksnya.

Nilai variabel dasar yang telah ditransformasikan bersama dengan nilai variabel dasar yang lain akan membentuk suatu indikator atau sub indeks, yang jika didekomposisikan lebih lanjut akan membentuk atau menghasilkan indeks total. Kumpulan/agregasi dari sejumlah sub indeks akan membentuk indeks yang lebih tinggi, yang berakhir dengan terbentuknya suatu indeks total, yang dalam studi ini dinamakan dengan Indeks Pembangunan Desa (IPDesa). Kedua rumus sistem indeks tersebut akan diterapkan terhadap variabel-variabel yang membentuk suatu indikator (keseluruhan ada 9 indikator), dengan menerapkan bobot sama atas semua indikator pembentuk IPDesa (Wang, 2007).

Untuk mendapatkan hasil akhir dalam bentuk indeks total atau Indeks Pembangunan Desa (IPDesa), dilakukan sistem perhitungan indeks dengan rumus sebagai berikut:

$$IPDesa (i) = \sum_{j=1}^9 a. IPPD (ij) \quad \dots \dots \dots (2.3)$$

Di mana:

- IPDesa : Indeks Pembangunan Desa
- $i$  : Desa ke- $i$
- $\Sigma$  : Penjumlahan dari Keseluruhan IPPD
- $j$  : Indikator ke- $j$
- $a.$  : Bobot Indikator
- IPPD : Indikator Penentu Pembangunan Desa (9 indikator)

Untuk menguji tingkat keeratan hubungan / korelasi antara indeks total (IPDesa) dan indikator pembentuknya (ada 9 indikator), digunakan alat uji Korelasi Pearson (*The Pearson's Product Moment Correlation Coefficients*) sebagaimana yang telah dilakukan juga oleh Ogowang (1997), Cahill (2005), dan Wang (2007)).

### C. Karakteristik Pembeda Kemajuan Pembangunan Desa

Setelah ditemukan indikator dan Indeks Pembangunan Desa (IPDesa), dalam studi ini akan dikaji karakteristik kemajuan pembangunan desa, jika dilihat dari 5 (lima) variabel pembeda, yaitu: (i) jenis/tipologi desa, (ii) pembagian zona kota-desa, (iii) kondisi perpindahan penduduk desa (*net migrations*), (iv) jangkauan pelayanan (jarak kabupaten dengan desa), dan (v) rasio jenis kelamin (*sex ratio*). Penjabaran selengkapny adalah sebagai berikut:

### 1. **Jenis/Tipologi Desa**

Jenis/tipologi desa berdasar kajian Badan Pusat Statistik (BPS) pada tahun 2009 dalam kegiatan Sensus Data Potensi Desa dan Kelurahan Tahun 2008 (PODES Tahun 2008), klasifikasi desa dibagi ke dalam beberapa kategori, yaitu: (i) Desa Tanaman Pangan - Padi; (ii) Desa Tanaman Pangan - Palawija; (iii) Desa Tanaman Pangan - Hortikultura; (iv) Desa Perkebunan; (v) Desa Peternakan; (vi) Desa Kehutanan; (vii) Desa Pertanian Lainnya; (viii) Desa Pertambangan dan Penggalian; (ix) Desa Industri Pengolahan; (x) Desa Perdagangan Besar, Eceran dan Rumah Makan; (xi) Desa Pengangkutan, Pergudangan dan Komunikasi; (xii) Desa Jasa; serta (xiii) Desa Sektor Ekonomi Lainnya (Sektor Gas, Listrik dan Air Bersih; dan Sektor Perbankan dan Jasa Perusahaan Lainnya). Pembagian tersebut berdasar lapangan pekerjaan yang sebagian besar menjadi mata pencaharian dari penduduk desa setempat.

### 2. **Pembagian Zona Kota-Desa (Rasio Lahan Pertanian)**

Lahan di suatu desa secara umum dibedakan menjadi 2 (dua) macam, yaitu lahan tanah sawah dan lahan tanah kering. Lahan pertanian identik dengan lahan tanah sawah, yang dinyatakan dalam satuan luas (Hektar atau Ha); sedang persentase luas lahan pertanian dinyatakan sebagai rasionya terhadap keseluruhan luas lahan di suatu desa. Lahan pertanian dalam studi ini akan dikelompokkan ke dalam 4 (empat) kategori/zona, yaitu: (i) *Zona Bingkai Kota* (rasio luas lahan pertanian < 25%); (ii) *Zona Bingkai Kota Desa* (rasio rasio luas lahan pertanian antara 25% sampai < 50%); (iii) *Zona Bingkai Desa Kota* (rasio luas lahan pertanian antara 50% sampai < 75%); dan (iv) *Zona Bingkai Desa* (rasio luas lahan pertanian  $\geq$  75%).

### 3. **Migrasi Desa Bersih (Net Migrations)**

Migrasi dalam konteks masyarakat desa dicerminkan dengan data jumlah penduduk yang datang (*in migration*) dan jumlah penduduk yang pergi/pindah (*out migration*), baik laki-laki maupun perempuan di suatu desa. Data migrasi dinyatakan dalam satuan jumlah (jiwa atau orang). Variabel net migrasi dihitung dari selisih antara migrasi datang dengan migrasi pergi/pindah. Jika penduduk desa lebih banyak yang pergi, maka net migrasi bertanda negatif (-). Sebaliknya, jika penduduk suatu desa lebih banyak yang datang, maka net migrasi bertanda positif (+).

### 4. **Jangkauan Pelayanan (Jarak Pusat Kabupaten dengan Desa)**

*Variabel Jarak.* Variabel jarak menunjukkan besaran atau panjangnya jarak antara pusat pemerintahan (kantor kabupaten) dengan kantor pemerintahan desa. Data jarak diukur dalam satuan jarak perjalanan (km). Variabel jarak dalam studi ini dibagi menjadi 3 (tiga) wilayah, yaitu: (i) *Wilayah Pusat* (kantor desa terletak antara 0 sampai < 10 km); (ii) *Wilayah Tengah* (kantor desa terletak antara 10 sampai < 20 km); dan (iii) *Wilayah Pinggir* (letak kantor desa berjarak 20 km atau lebih).

### 5. **Rasio Jenis Kelamin (Sex Ratio)**

Rasio Jenis Kelamin (*Sex Ratio*) adalah rasio antara jumlah penduduk laki-laki terhadap jumlah penduduk perempuan dikali 100. Secara umum kecenderungan di sebagian besar desa-desa di Kabupaten Klaten menunjukkan bahwa penduduk berjenis kelamin perempuan lebih banyak dibanding penduduk laki-laki. Variabel rasio jenis kelamin akan dikelompokkan menjadi 2 (dua), yaitu kurang dari 100 (penduduk perempuan lebih dominan), dan lebih besar dari 100 (penduduk laki-laki lebih dominan).

Untuk melihat efek variabel bebas atau variabel faktor tersebut di atas (ada 5 (lima) faktor) terhadap variabel terikat (besaran IPDesa) dengan membandingkan rerata dari beberapa populasi, digunakan alat analisis varian satu jalur (*one way ANOVA*). Hal ini disebabkan hanya terdapat satu variabel bebas yang berskala nominal/ordinal (ada 5 (lima) faktor) yang mempengaruhi variabel terikat (besaran IPDesa) (Kazmier and Pohl (1987); Wonnacott and Wonnacott (1990)).

### III. HASIL DAN PEMBAHASAN

Pada bagian berikut akan dibahas hasil kajian indikator kemajuan pembangunan desa yang dibagi ke dalam 2 (dua) kelompok pembahasan, yaitu bagian yang membahas hasil perhitungan Indeks Pembangunan Desa (IPDesa) secara makro, yang mengindikasikan kinerja pembangunan desa di 391 desa yang tersebar di 26 kecamatan di Kabupaten Klaten pada tahun 2011; dan bagian perbedaan pembangunan desa berdasar 5 (lima) faktor pembeda yang disinyalir mempengaruhi kinerja pembangunan desa.

#### A. Kinerja Pembangunan Desa

Kinerja pembangunan desa yang diindikasikan dengan Indeks Pembangunan Desa (*IPDesa*) yang merupakan hasil dekomposisi dari 9 (sembilan) indikator pembentuk *IPDesa* dengan bobot sama; dari Tabel 3.1 dapat dilihat bahwa nilai *IPDesa* di Kabupaten Klaten pada tahun 2011 yang mencakup sejumlah 391 desa nilainya sebesar 4,198 (dari nilai maksimal sebesar 10 satuan indeks). Hal ini mengindikasikan bahwa kinerja pembangunan desa di Kabupaten Klaten secara makro masih relatif rendah. Nilai ini terletak antar rentang terendah sebesar 3,487 dan nilai tertinggi sebesar 5,297 dengan standar deviasinya sebesar 0,307. Gambaran statistik deskriptif, selengkapnya dapat dilihat pada *Lampiran 2*.

**Tabel 3.1 Nilai Absolut dan Besaran Korelasi antar Rerata IPDesa dan Indikator Pembentuknya di Kabupaten Klaten, Provinsi Jawa Tengah Tahun 2010**

Indikator Pembentuk IPDesa	Nilai Absolut		Nilai Korelasi	
	Besaran	Peringkat	Besaran	Peringkat
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1. IKAJPP	7.035	1	-0.285 <sup>a</sup>	6
2. IKAKUD	2.195	8	0.531 <sup>a</sup>	2
3. ISAPER	2.190	9	0.275 <sup>a</sup>	7
4. ISTRANT	2.549	7	0.621 <sup>a</sup>	1
5. IGAPMAS	3.367	6	0.330 <sup>a</sup>	5
6. IJAHMAS	5.161	4	0.430 <sup>a</sup>	3
7. IDIKMAS	5.702	3	0.241 <sup>a</sup>	8
8. IKESMAS	3.567	5	0.186 <sup>a</sup>	9
9. IJAHKEL	6.014	2	0.367 <sup>a</sup>	4
IPDesa	4.198			

**Catatan:** *IKAJPP*: Indikator Kapasitas Aparatur dan Jangkauan Pelayanan Publik; *IKAKUD*: Indikator Kekayaan dan Keuangan Desa; *ISAPER*: Indikator Sarana Perekonomian Desa; *ISTRANT*: Indikator Sarana Transportasi dan Telekomunikasi; *IGAPMAS*: Indikator Kelembagaan dan Partisipasi Masyarakat Desa; *IJAHMAS*: Indikator Kesejahteraan Masyarakat; *IDIKMAS*: Indikator Pendidikan Masyarakat; *IKESMAS*: Indikator Kesehatan Masyarakat; *IJAHKEL*: Indikator Kesejahteraan Keluarga; dan *IPDesa*: Indeks Pembangunan Desa.

<sup>a</sup> Derajat hubungan / korelasi signifikan pada tingkat kesalahan 1% atau tingkat keyakinan akan kebenaran derajat korelasi sebesar 99%.

**Sumber:** Hasil Pengolahan Data Sekunder dengan Program SPSS 16, Tahun 2014

Di lain pihak, jika dilihat dari nilai absolut dan besaran/derajat korelasi dari 9 (sembilan) indikator pembentuk *IPDesa*, Indikator Kapasitas Aparatur dan Jangkauan Pelayanan Publik (*IKAJPP*) mempunyai nilai terbesar secara absolut, tetapi mempunyai derajat hubungan yang relatif rendah (ranking ke-6). Sementara Indikator Sarana Transportasi dan Telekomunikasi (*ISTRANT*) yang secara hubungan menempati urutan pertama dengan derajat korelasi sebesar 62,1%, namun dari sisi besaran absolut hanya menempati urutan ke-7. Salah satu indikator yang secara absolut maupun derajat korelasi yang hampir sama adalah Indikator Kesejahteraan Masyarakat (*IJAHMAS*). Hal ini membawa implikasi bahwa permasalahan produksi padi, jumlah penduduk miskin, jumlah penyandang cacat, peristiwa perceraian yang terjadi selama satu tahun, jumlah ternak (baik besar maupun kecil) dan juga ternak unggas menjadi variabel penting dalam mempertinggi kualitas pembangunan desa

## B. Perbedaan Kinerja Pembanguna Desa

Perbedaan kinerja pembangunan desa yang akan dihas pada bagian ini, dilihat berdasar 5 (lima) sudut pandang, yaitu berdasar: (a) jenis/ tipologi desa, (b) pembagian zona kota-desa, (c) kondisi perpindahan penduduk desa (*net migrations*), (d) jangkauan pelayanan (jarak kabupaten dengan desa), dan (e) rasio jenis kelamin (*sex ratio*). Penjelasan selengkapnya adalah sebagai berikut:

### 1. Kinerja Pembangunan Desa Berdasar Jenis / Tipologi Desa

Dari Tabel 3.2 dapat dilihat bahwa untuk kasus di Kabupaten Klaten, kategori Desa Sektor Lainnya (ada 8 desa) yang berdasar klasifikasi BPS (2009) terdiri atas desa-desa yang dominan pada mata pencaharian di Sektor Gas, Listrik dan Air Bersih; dan Sektor Perbankan dan Jasa Perusahaan Lainnya; mempunyai *IPDesa* paling tinggi (rerata nilai *IPDesa* sebesar 4,265), dibanding desa kategori lainnya. Sementara desa yang paling rendah kinerja pembangunan desanya adalah Desa Peternakan (ada 4 desa, dengan rerata *IPDesa* sebesar 3,947) yang sebagian besar berada di dataran pegunungan di Kecamatan Kemalang. Desa-desa ini sering terkena bencana letusan dari Gunung Merapi.

Desa-desa di Kabupaten Klaten yang relatif tinggi kinerjanya adalah Desa Pertanian Padi (sebanyak 300 desa, dengan nilai rerata *IPDesa* sebesar 4,198) dan Desa Pertanian Palawija (sebanyak 28 desa, dengan nilai rerata *IPDesa* sebesar 4,259). Dengan total desa sebanyak 391 desa, maka rasio Desa Pertanian Padi di Kabupaten Klaten mencapai 76,73%. Hal inilah yang kemungkinan juga berimplikasi pada bagian selanjutnya bahwa rasio tanah sawah yang semakin besar (zona desa-kota), kinerja pembagunan desanya semakin tinggi.

Secara statistik memang tidak bisa dibuktikan bahwa faktor jenis/tipologi desa berpengaruh terhadap besaran *IPDesa*. Hal ini dibuktikan dengan besaran uji F (uji beda rerata) dengan nilai sebesar 1,189 dengan probabilitas tingkat kesalahan sebesar 30,8%. Gambaran hasil selengkapnya dapat dilihat pada Tabel 3.2 berikut ini.

**Table 3.2 Kinerja Pembangunan Desa Berdasar Karakteristik Jenis/Tipologi Desa di Kabupaten Klaten, Data Tahun 2011**

Tipologi Desa	N	Rerata	Ranking
(1)	(2)	(3)	(4)
1. Pertanian Padi	300	4.198	4
2. Pertanian Palawija	28	4.259	3
3. Peternakan	4	3.947	8
4. Pertambang.&Penggalian	6	4.064	7
5. Industri Pengolahan	15	4.183	5
6. Perdag. &Rumah Makan	12	4.066	6
7. Jasa	18	4.260	2
8. Sektor Lainnya	8	4.265	1
<b>Total</b>	<b>391</b>	<b>4.198</b>	
<b>Uji F (Uji Beda) = 1.189 (Prob. Kesalahan = 30,8%)</b>			

Sumber: Hasil Pengolahan Data Sekunder dengan Program SPSS 16, Tahun 2014

## 2. Kinerja Pembangunan Desa Berdasar Pembagian Zona Kota-Desa

Rasio luas lahan pertanian terhadap keseluruhan lahan di setiap desa di Kabupaten Klaten menunjukkan bahwa semakin besar rasio luas lahan pertanian, semakin besar tingkat kemajuan pembangunan di desa yang bersangkutan. Zona Bingkai Desa dengan rasio luas lahan pertanian di atas 75% (sebanyak 61 desa) mempunyai besaran *IPDesa* yang paling tinggi (nilai rerata *IPDesa* sebesar 4,279). Gambaran selengkapnya dapat dilihat pada Tabel 3.3 berikut ini.

**Table 3.3 Kinerja Pembangunan Desa Berdasar Pembagian Zona Kota-Desa di Kabupaten Klaten, Data Tahun 2011**

Zona Kota-Desa	N	Rerata	Ranking
(1)	(2)	(3)	(4)
1. Luas Lahan < 25%	48	4.186	3
2. Luas Lahan 25 - < 50%	40	4.128	4
3. Luas Lahan 50 - < 75%	242	4.191	2
4. Luas Lahan $\geq$ 75%	61	4.279	1
<b>Total</b>	<b>391</b>	<b>4.198</b>	
<b>Uji F (Uji Beda) = 2.206 (Prob. Kesalahan = 8,7%)</b>			

**Sumber:** Hasil Pengolahan Data Sekunder dengan Program SPSS 16, Tahun 2014

Dari Tabel 3.3 di atas, juga dapat dibuktikan bahwa faktor rasio luas lahan pertanian berpengaruh terhadap besaran *IPDesa*. Hal ini dibuktikan dengan besaran uji F (uji beda rerata) dengan nilai sebesar 2,206 dengan probabilitas tingkat kesalahan sebesar 8,7%.

## 3. Kinerja Pembangunan Desa Berdasar Perpindahan Penduduk (Net Migrations)

Kinerja pembangunan desa di Kabupaten Klaten berdasar variabel migrasi bersih, ternyata menunjukkan hal yang sangat menarik. *Pertama*, secara statistik nilainya signifikan yang dibuktikan dengan besaran uji F (uji beda rerata) sebesar 8,929 dengan probabilitas tingkat kesalahan sebesar 0,3%. Hal ini mempunyai makna bahwa variabel net migrasi mempunyai pengaruh terhadap *IPDesa*. *Kedua*, dengan *slope* / kemiringan yang negatif menunjukkan bahwa desa dengan penduduk banyak yang datang (ada 192 desa), kinerja *IPDesa*-nya justru lebih rendah. Sebaliknya, semakin banyak penduduk yang pergi / pindah (ada 199 desa), besaran *IPDesa*-nya justru lebih tinggi. Gambaran selengkapnya dapat dilihat pada Tabel 3.4 berikut ini.

**Table 3.4 Kinerja Pembangunan Desa Berdasar Perpindahan Penduduk (Net Migrations) di Kabupaten Klaten, Data Tahun 2011**

Net Migrasi	N	Rerata	Ranking
(1)	(2)	(3)	(4)
1. Banyak Penduduk Pindah	199	4.243	1
2. Banyak Penduduk Datang	192	4.151	2
<b>Total</b>	<b>391</b>	<b>4.198</b>	
<b>Uji F (Uji Beda) = 8.929 (Prob. Kesalahan = 0,3%)</b>			

**Sumber :** Hasil Pengolahan Data Sekunder dengan Program SPSS 16, Tahun 2014

Kondisi seperti tersebut di atas jangan-jangan mengindikasikan bahwa lapangan pekerjaan di daerah perdesaan, khususnya di Kabupaten Klaten masih jauh dari mencukupi, sehingga semakin banyak penduduk yang menuju ke suatu desa, akan mengakibatkan beratnya beban yang ditanggung oleh desa yang bersangkutan, dan akan mengakibatkan semakin rendahnya kinerja pembanguna desa di desa tersebut.

#### 4. Kinerja Pembangunan Desa Berdasarkan Jangkauan Jarak Pelayanan

Secara statistik memang tidak terbukti adanya pengaruh variabel jarak terhadap besaran *IPDesa*, yang dibuktikan dengan besaran nilai uji F (uji beda rerata) sebesar 0.053, dengan probabilitas tingkat kesalahan sebesar 94,8%. Gambaran selengkapnya dapat dilihat pada Tabel 3.5 berikut ini.

**Table 3.5 Kinerja Pembangunan Desa Berdasarkan Jangkauan Jarak Pelayanan di Kabupaten Klaten, Data Tahun 2011**

Jarak Kab.-Desa	N	Rerata	Ranking
(1)	(2)	(3)	(4)
1. Jarak < 20 km	64	4.187	3
2. Jarak 20 - < 40 km	182	4.199	2
3. Jarak ≥40 km	145	4.201	1
<b>Total</b>	<b>391</b>	<b>4.198</b>	
<b>Uji F (Uji Beda) = 0.053 (Prob. Kesalahan= 94,8%)</b>			

Sumber: Hasil Pengolahan Data Sekunder dengan Program SPSS 16, Tahun 2014

Walaupun secara statistik tidak terbukti signifikan, namun ada hal menarik dari hasil kajian yang telah dilakukan, yaitu bahwa semakin jauh jarak desa dengan pusat pemerintahan kabupaten, semakin tinggi kinerja pembangunan desa (*IPDesa*)-nya. Untuk kasus di Kabupaten Klaten, semakin tingginya kinerja pembangunan desa dari desa-desa yang semakin jauh dari pusat pemerintahan kabupaten, disinyalir akibat pengaruh dari wilayah kabupaten / kota di sekitarnya (Provinsi DIY, Kota Surakarta, Kabupaten Sukoharjo, dan Kabupaten Boyolali).

#### 5. Kinerja Pembangunan Desa Berdasarkan Rasio Jenis Kelamin (Sex Ratio)

Dengan tingkat kesalahan sebesar 13,1%; ada pengaruh dari faktor jenis kelamin (*sex ratio*) terhadap kinerja pembangunan desa (*IPDesa*). Sebagaimana yang telah diterangkan pada bagian sebelumnya bahwa ada kecenderungan saat ini bahwa penduduk dengan jenis kelamin perempuan lebih dominan dibanding dengan penduduk laki-laki. Untuk kasus di Kabupaten Klaten, desa-desa dengan penduduk perempuan lebih banyak ada sebanyak 295 desa (sekitar 75,45% dari total populasi desa yang berjumlah 391 desa).

Dari Tabel 3.6 dapat dilihat bahwa desa-desa dengan jumlah penduduk perempuan lebih dominan dibanding dengan jumlah penduduk laki-laki, mempunyai kinerja pembangunan desa (*IPDesa*) yang lebih tinggi. Hal ini tentu lebih menarik lagi jika variabel jenis kelamin ini juga diintegrasikan dengan jenis pekerjaan menurut sektor ekonomi (jenis/tipologi desa), sehingga bisa ditemukan desa-desa dengan mata pencaharian mana yang lebih maju dengan penduduk perempuan lebih banyak, begitu pula sebaliknya. Hal ini penting untuk pengembangan desa-desa pada masa-masa mendatang.

**Table 3.6 Kinerja Pembangunan Desa Berdasarkan Rasio Jenis Kelamin (Sex Ratio) di Kabupaten Klaten, Data Tahun 2011**

Rasio Jenis Kelamin	N	Rerata	Ranking
(1)	(2)	(3)	(4)
1. Banyak Penduduk Wanita	295	4.211	1
2. Banyak Penduduk Pria	96	4.157	2
<b>Total</b>	<b>391</b>	<b>4.198</b>	
<b>Uji F (Uji Beda) = 2.286 (Prob. Kesalahan= 13,1%)</b>			

Sumber: Hasil Pengolahan Data Sekunder dengan Program SPSS 16, Tahun 2014

#### IV. SIMPULAN

Dari serangkaian kajian yang telah diuraikan pada bagian sebelumnya, maka beberapa simpulan yang dapat diambil adalah sebagai berikut:

1. Salah satu indikator yang mempunyai nilai secara absolut maupun derajat korelasinya relatif tinggi terkait dengan sumbangan dan kekeratan hubungan dengan *IPDesa*, adalah Indikator Kesejahteraan Masyarakat (*IJAHMAS*). Hal ini membawa implikasi bahwa indikator *IJAHMAS* memegang peran penting dalam pembentukan/formulasi *IPDesa*.
2. Di antara 5 (lima) variabel pembeda, hanya ada 2 (dua) variabel pembeda yang signifikan, yaitu variabel pembagian zona kota-desa dan variabel perpindahan penduduk desa (*net migrations*).
3. Dari hasil kajian berdasar pembagain zona kota-desa mengindikasikan bahwa semakin besar lahan pertanian, semakin tinggi tingkat kualitas pembangunan desa. Hal ini mengindikasikan bahwa lahan pertanian masih mempunyai peran penting di perdesaaan, khususnya sebagai lahan mata pencaharian penduduk desa.
4. Hasil kajian atas besaran perpindahan penduduk bersih (*net migrations*) menunjukkan bahwa desa-desa yang semakin banyak didatangi penduduk justru memberikan hasil kemajuan pembangunan desa yang lebih rendah. Hal ini disinyalir bahwa lapangan pekerjaan di perdesaaan masih sangat langka / terbatas untuk menampung jumlah tenaga kerja yang tersedia.
5. Desa-desa dengan jumlah penduduk perempuan lebih dominan dibanding dengan jumlah penduduk laki-laki, mempunyai kinerja pembangunan desa (*IPDesa*) yang lebih tinggi. Hal ini akan lebih menarik lagi, jika variabel jenis kelamin diintegrasikan dengan jenis pekerjaan menurut sektor ekonomi (jenis/ tipologi desa), sehingga bisa ditemukan desa-desa dengan mata pencaharian mana yang lebih maju dengan penduduk perempuan lebih banyak, begitu pula sebaliknya.

#### V. REKOMENDASI

Rekomendasi yang dapat diberikan terkait dengan studi yang telah dilakukandengan mengambil kasus di 391 desa di Kabupaten Klaten, adalah sebagai berikut:

1. Implementasi atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, memerlukan kajian yang lebih mendalam. Hasil kajian dengan menerapkan kasus di 391 desa (seluruh desa) di Kabupaten Klaten tahun 2011, mempunyai banyak dimensi dan banyak variasi hasil. Hal ini membawa implikasi bahwa kebijakan pembangunan desa tidak bisa disamaratakan, namun harus mempertimbangkan banyak variabel / indikator yang dapat mempengaruhi kemajuan pembangunan desa.
2. Perhatian terhadap peningkatan produksi padi, pengendalian jumlah penduduk miskin, penanganan jumlah penyandang cacat, perhatian terhadap peristiwa perceraian yang terjadi selama satu tahun, peningkatan jumlah ternak (baik besar maupun kecil) dan juga ternak unggas; perlu diberikan bobot yang lebih besar. Variabel-variabel tersebut menjadi variabel penting dalam mempertinggi kualitas kemajuan pembangunan desa.
3. Luas lahan pertanian masih memegang peranan penting di perdesaaan. Oleh karenanya, peraturan mengenai '*sawah lestari*' yang sering diterapkan dalam dokumen Rencana Tara Ruang Wilayah (RTRW) tingkat provinsi, sebaiknya dan seharusnya terus diawasi hingga implementasinya di tingkat kabupaten / kota.
4. Dengan dana yang kelak akan diterima di setiap desa nilainya relatif besar, maka penggunaan/ alokasi ke arah penciptaan lapangan pekerjaan di perdesaaan, sangat mendesak dilakukan. Selain untuk mengurangi urbanisasi, juga bisa berfungsi sebagai sarana untuk meningkatkan kinerja pembangunan desa.

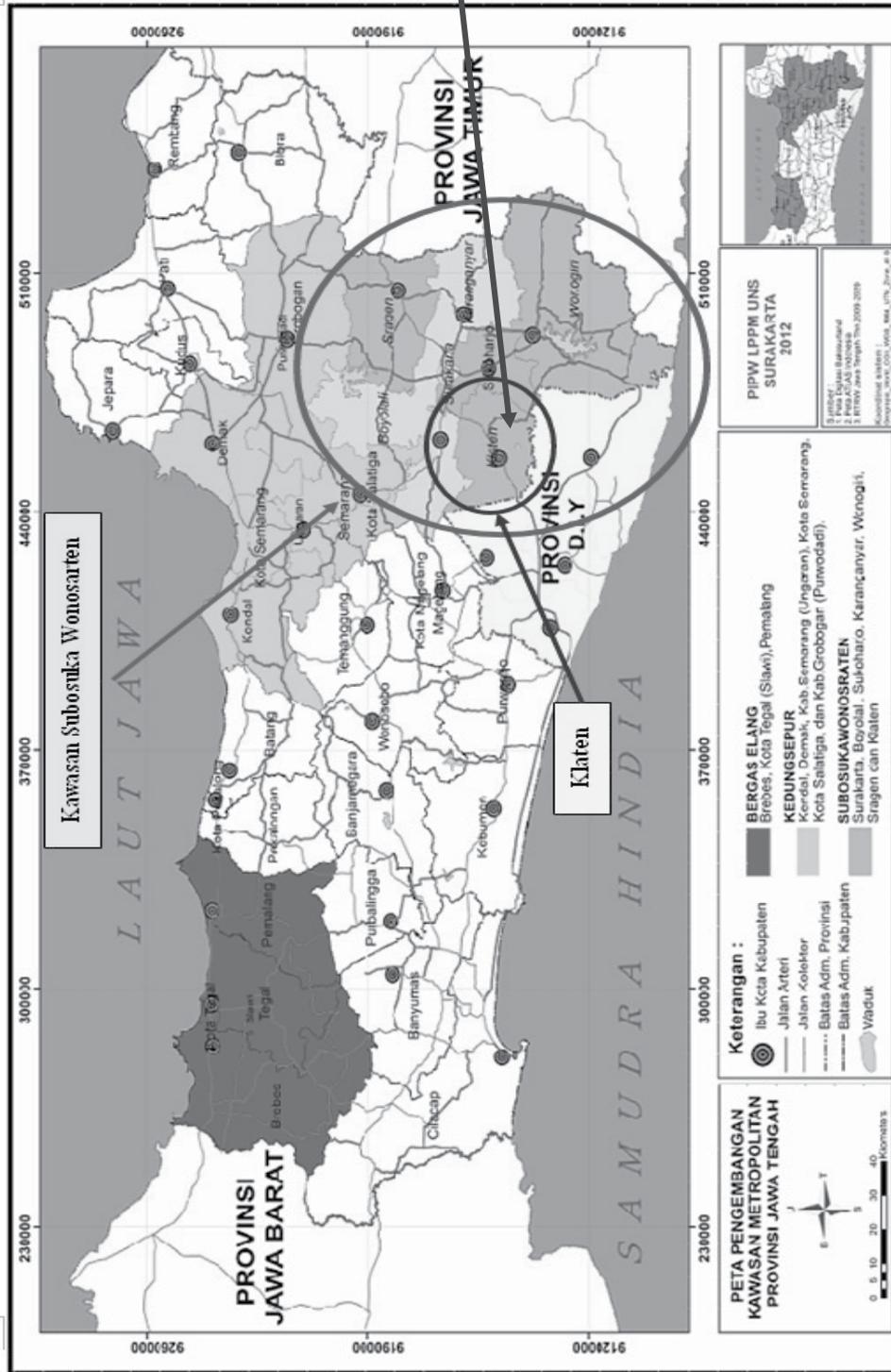
5. Adopsi model *IPDesa* ini ke kabupaten/kota yang lain perlu dilakukan. Kantor Ikatan Sarjana Ekonomi Indonesia (ISEI) Pusat dapat menginisiasi kajian ini sebagai dasar untuk memperkuat implementasi atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.

## DAFTAR PUSTAKA

- Agarwal, Manmohan and Sayan Samanta. (2006). Structural Adjustment, Governance, Economic Growth and Social Progress. *Journal of International Trade and Economic Development*, V. 15, Sept. No.3, p.387-401.
- Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas). (2001). *Indeks Pembangunan Daerah (Regional Development Index)*. Draft/Rancangan dalam Bentuk Ringkasan. Jakarta: Bappenas.
- \_\_\_\_\_. BPS dan UNDP. (2001). *Indonesia Human Development Report 2001: Towards a New Consensus, Democracy and Human Development in Indonesia*. Jakarta: Bappenas, BPS dan UNDP.
- \_\_\_\_\_. (2004). *National Human Development Report 2004: The Economics of Democracy, Financing Human Development in Indonesia*. Jakarta: Bappenas, BPS dan UNDP.
- Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Klaten. (2012). *Kecamatan Dalam Angka di Seluruh Kecamatan (26 Kecamatan) di Kabupaten Klaten Tahun 2011*. Klaten: BPS Kabupaten Klaten.
- Briguglio, Lino, Gordon Cordina, Nadia Farrugia and Stephanie Vella. (2008). *Economic Vulnerability and Resilience: Concepts and Measurements*. Research Paper No. 2008/55, May. Helsinki-Finland: UNU World Institute for Development Economics Research (UNU-WIDER).
- Cahill, Miles B. (2005). Is the Human Development Index Redundant? *Eastern Economic Journal*, Vol.31, No.1, Winter, p.1-5.
- Gusztav, N. (2005). Intergrated Rural Development: The Concept and Its Operation. *Institute of Economics, Hungarian Academic of Science Discussion Paper*, No. MT-DP 2005/6.
- Kazmier, Leonard J. and Norval F. Pohl. (1987). *Basic Statistics for Business and Economics*, Second Edition. Singapore: McGraw-Hill Book Company.
- Manasan, Rosario G., Eduardo T. Gonzalez and Romualdo B. Gaffud. (1999). *Indicators of Good Governance: Developing an Index of Governance Quality at the LGU Level*, Discussion Paper Series, No. 99-04, March. Philippine: Philippine Institute for Development Studies.
- Mulyanto. (2013). The Model of Index for Massuring the Progress of Rural Development at Autonomy Era in Indonesia: A Pilot Piject in Klaten Regency, Central Java. *Paperpresented in the 38th Conference of the Federation of ASEAN Economic Associations (FAEA)*, Singapore, 27th-29th November.
- \_\_\_\_\_. and Habibullah Magsi. (2014). Approaches to measure quality of human resource development index in the village context: case of Central Java, Indonesia. *The Macrotheme Review: A multidisciplinary journal of global macro trends*. Vol.3, Nomor 6, Summer, p.1-17.
- Nafziger, E. Wayne. (2006). *Economics Development*, Fourth Edition. Cambridge: Cambridge University Press.
- Ogwang, Tomson. (1997). The Choice of Principal Variables for Computing the Physical Quality of Life Index. *Journal of Economic and Social Measurement* No. 23, p. 213-21.
- Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesai Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesai Nomor 5539).

- Price-WaterhouseCooper. (2001). Regions and Development: The Regional Attractiveness Index. [http://www2.nos.noaa.gov/gomexcoastal\\_resil/batonr\\_mar08/06\\_reams.pdf](http://www2.nos.noaa.gov/gomexcoastal_resil/batonr_mar08/06_reams.pdf).
- Stevens, Candice. (2005). Measuring Sustainable Development. *Statistics Brief OECD*, No.10, September, p. 1-8.
- UNDP. (2006). *Human Development Report 2006 (Beyond Scarcity: Power, Poverty and the Global Water Crisis)*. New York: Palgrave Macmillan Ltd.
- Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesai Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesai Nomor 5495).
- UN-HABITAT. (2002). Urban Governance Index (UGI): A Tool to Measure Progress in Achieving Good Urban Governance [Global Campaign on Urban Governance]. [http://www.Impac-talliance.org/file\\_download.php?location=S\\_U&filename=11533840311Urban\\_Governance\\_Index.pdf](http://www.Impac-talliance.org/file_download.php?location=S_U&filename=11533840311Urban_Governance_Index.pdf).
- Wang, Xiaolu. (2007). Who's in First? A Regional Development Index for the People's Republic of China's Provinces, *ADB Institute Discussion Paper*, No.66, May, pp.1-31.
- Wonnacott, Thomas H. and Ronald J. Wonnacott. (1990). *Introductory Statistics for Business and Economics*, Fourth Edition. Singapore: John Wiley and Sons.
- YaleUniversity. (2005). *Environmental Sustainability Index: Benchmarking National Environmental Stewardship*. Haven-USA: Yale Center for Environmental Law and Policy. New
- Zgurovsky, Michael. (2007). Impact of the Information Society on Sustainable Development: Global and Regional Aspects, *Data Science Journal*, Vol. 6 (Supplement), March, pp.S137-S145.

Lampiran 1. Peta Lokasi Penelitian di Kabupaten Klaten, Provinsi Tengah Jawa Lampran 2. Statistik Deskriptif dari Indikator Pembantu IPDesa di Kabupaten Klaten Tahun 2011



<b>Indonesia (2012)</b>	- 33 Provinces	- 399 Regencies	- 98 Cities	- 6,652 Subdistricts	- 77,012 Villages
<b>Central Java (2012)</b>	- 29 Regencies	- 6 Cities	- 573 Subdistricts	- 8,578 Villages	
<b>Klaten Regency</b>	- 26 Subdistricts	- 391 Villages	(a) 300 Paddy Vill.	(b) 28 Crops Vill.	(c) 4 Livestock
			(d) 6 Mining & Quarrying	(e) 15 Manufact.	(f) 12 Wholesale Retail & Restaurant
			(g) 18 Services	(h) 6 Others	

**Lampiran 2. Statistik Deskriptif dari Indikator Pembentuk IPDesa di Kabupaten Klaten Tahun 2011**

Indikator Pembentuk IPDesa	N	Mini - mum	Maxi - mum	Rerata	Std. Deviasi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1. <i>IKAJPP</i>	391	2.46 5	9.71 3	7.03 5 (1)	1.22 7
2. <i>IKAKUD</i>	391	0.629	7.68 8	2.195 (8)	0.88 9
3. <i>ISAPER</i>	391	0.436	6.568	2.190 (9)	0.891
4. <i>ISTRANT</i>	391	0.121	8.200	2.54 9 (7)	1.5 60
5. <i>IGAPMAS</i>	391	0.690	6.780	3.367 (6)	1.118
6. <i>IJAHMAS</i>	391	2.98 4	8.10 2	5.16 1 (4)	0.851
7. <i>IDIKMAS</i>	391	2.6 20	8.555	5.70 2 (3)	0.855
8. <i>IKESMAS</i>	391	1.478	6.432	3.567 (5)	0.776
9. <i>IJAHKEL</i>	391	3.550	7.91 2	6.014 (2)	0.926
<b>IPDesa</b>	<b>391</b>	<b>3.48 7</b>	<b>5.297</b>	<b>4.19 8</b>	<b>0.30 7</b>

**Catatan:** *IKAJPP*: Indikator Kapasitas Aparatur dan Jangkauan Pelayanan Publik; *IKAKUD*: Indikator Kekayaan dan Keuangan Desa; *ISAPER*: Indikator Sarana Perekonomian Desa; *ISTRANT*: Indikator Sarana Transportasi dan Telekomunikasi; *IGAPMAS*: Indikator Kelembagaan dan Partisipasi Masyarakat Desa; *IJAHMAS*: Indikator Kesejahteraan Masyarakat; *IDIKMAS*: Indikator Pendidikan Masyarakat; *IKESMAS*: Indikator Kesehatan Masyarakat; *IJAHKEL*: Indikator Kesejahteraan Keluarga; dan *IPDesa*: Indeks Pembangunan Desa.

<sup>a</sup> Derajat hubungan / korelasi signifikan pada tingkat kesalahan 1% atau tingkat keyakinan akan kebenaran derajat korelasi sebesar 99%.

**Sumber:** Hasil Pengolahan Data Sekunder dengan Program SPSS 16, Tahun 2014